

**PENYERAHAN ALAT BANTU PENDENGARAN BAGI TUNA RUNGU OLEH DINAS  
SOSIAL WONOSOBO**

Nicholas Endra Sirait, Malida Putri  
Universitas Sumatera Utara

[nicholassirait01@gmail.com](mailto:nicholassirait01@gmail.com), [malidaputri@usu.ac.id](mailto:malidaputri@usu.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dampak program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo terhadap kualitas hidup penyandang disabilitas auditif di wilayah tersebut. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi perubahan positif dalam aksesibilitas, pemberdayaan individu, dan dukungan dari Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aksesibilitas fisik dan komunikasi, memungkinkan penyandang disabilitas untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan individu menjadi aspek penting, dengan alat bantu pendengaran bukan hanya berfungsi sebagai solusi teknis tetapi juga sebagai simbol kebebasan dan kemandirian. Para penerima manfaat melaporkan peningkatan kepercayaan diri, memungkinkan mereka terlibat lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Peran proaktif Dinas Sosial Wonosobo menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program ini. Selain menyediakan alat bantu, Dinas Sosial juga terlibat dalam memberikan edukasi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Meskipun program ini memiliki dampak positif, tantangan seperti kurangnya sosialisasi menuntut perluasan upaya kampanye publik. Kesimpulannya, program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo memberikan dampak positif dalam mendukung inklusi sosial dan kesejahteraan penyandang disabilitas auditif. Dengan mengatasi tantangan dan terus memperbaiki program, diharapkan program ini dapat berlanjut memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

**Kata Kunci :** Penyerahan, Alat Bantu, Tuna Rungu

**Abstract**

*This research analyzes the impact of the hearing aid distribution program by the Wonosobo Social Service on the quality of life of individuals with auditory disabilities in the region. Using a qualitative descriptive approach, the study explores positive changes in accessibility, individual empowerment, and support from the Social Service. The results indicate a significant improvement in physical and communication*

*accessibility, enabling individuals with disabilities to actively participate in daily life. Individual empowerment is crucial, with hearing aids serving not only as a technical solution but also as symbols of freedom and independence. Beneficiaries reported increased confidence, allowing them to engage more actively in social and economic activities. The proactive role of the Wonosobo Social Service is a key factor in the program's success. Besides providing hearing aids, the Social Service is actively involved in educating the community and creating an inclusive environment. Despite the program's positive impact, challenges such as a lack of socialization necessitate expanded public awareness campaigns. In conclusion, the hearing aid distribution program by the Wonosobo Social Service has a positive impact on supporting social inclusion and the well-being of individuals with auditory disabilities. Overcoming challenges and continuous program improvement are expected to contribute positively to creating a more inclusive society.*

**Keywords:** *Distribution, Assistive Devices, Hearing Impaired*

## **Pendahuluan**

Penyandang disabilitas, khususnya kaum Tuli, menghadapi tantangan signifikan dalam berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Meskipun hak-hak mereka dijamin oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya masih terkendala, terutama dalam aspek aksesibilitas dan kesetaraan. Masalah mendasar yang dihadapi oleh komunitas Tuli adalah kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas publik. Hal ini mencakup ketidaksetaraan dalam lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi. Sebagai contoh, penggunaan bahasa isyarat belum diakui sebagai bahasa ibu bagi kaum Tuli, menyulitkan mereka dalam berinteraksi dengan fasilitas publik. Keterbatasan ini terlihat dalam tidak adanya running text di layanan publik dan kurangnya sensitivitas pegawai penyedia layanan terhadap kebutuhan kaum Tuli.

Penyandang disabilitas, dengan dasar kesetaraan terhadap warga lainnya, berhak atas akses yang sama terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem dan teknologi komunikasi (Sastrawinata, 1977). Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Pasal 2 menetapkan bahwa bahasa

bagi penyandang disabilitas mencakup bahasa lisan, bahasa isyarat, dan bentuk-bentuk bahasa non-lisan lainnya. Komunikasi juga mencakup berbagai metode, seperti tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses, serta berbagai bentuk tertulis, audio, dan plain-language (Siddiqui, 1984). Namun, permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kaum Tuli adalah penggunaan bahasa isyarat yang belum diakui sebagai bahasa ibu untuk mereka. Ini menciptakan hambatan serius dalam interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Aksesibilitas komunitas Tuli terhadap fasilitas publik masih jauh dari harapan, terlihat dari ketidaksetaraan dalam layanan publik, seperti ketiadaan running text dan kurangnya sensitivitas pegawai penyedia layanan terhadap kebutuhan khusus mereka. Hal ini juga mempengaruhi peluang pekerjaan mereka, menciptakan tantangan tambahan dalam mengakses kesempatan ekonomi.

Sebelum ratifikasi CRPD, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah telah mencakup aspek-aspek seperti ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Namun, kendala muncul dalam implementasinya. Meskipun instrumen perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah ada, tingkat implementasinya masih terhambat. Organisasi seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) hadir sebagai agen advokasi. PPDI, dengan kantor perwakilan di berbagai daerah, melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap penyandang disabilitas. Upaya ini mencakup berbagai aspek, termasuk aksesibilitas fasilitas publik, hak-hak pekerjaan, dan kesetaraan dalam berbagai bidang (Suaja, 2013).

Selain itu, peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas, terutama kaum Tuli, masih terbatas. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan dapat menjadi

hambatan serius bagi pengembangan diri mereka. Oleh karena itu, penyelenggaraan penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo menjadi suatu inisiatif penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi kaum Tuli. Meskipun Indonesia memiliki instrumen perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, dan lainnya, implementasinya belum mencapai tingkat yang memadai. Organisasi seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia telah berperan dalam melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap penyandang disabilitas (Supardan, 2008).

Dalam konteks penelitian "Penyerahan Alat Bantu Pendengaran bagi Tuna Rungu oleh Dinas Sosial Wonosobo," penting untuk memahami bahwa inisiatif seperti itu dapat menjadi langkah konkrit untuk mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, khususnya kaum Tuli. Program ini dapat menjadi langkah positif menuju inklusi sosial dan ekonomi, memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses yang setara dengan warga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas dan dampak dari program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo terhadap kehidupan sehari-hari serta partisipasi sosial kaum Tuli. Dengan memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan implementasi dan efektivitas kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat lokal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengalaman, hambatan, dan dampak program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo, khususnya

terkait penyandang disabilitas, terutama kaum Tuli (Sugiono, 2010). Desain penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan penerima manfaat, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, analisis dokumen terkait program dan kebijakan terkait juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Subjek penelitian akan terdiri dari penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat program, serta pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna dan pengalaman secara mendalam guna memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan dampak program tersebut.

Dalam mengevaluasi program penyerahan alat bantu pendengaran bagi tuna rungu oleh Dinas Sosial Wonosobo, literatur review akan mengidentifikasi kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Fokus literatur review akan mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, program-program serupa di konteks nasional dan internasional, serta dampak positif yang diharapkan dari peningkatan aksesibilitas melalui alat bantu pendengaran. Literatur review juga akan menyelidiki perkembangan kebijakan terkait penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016.

## **Analisa dan Pembahasan**

### **Penyerahan Alat Bantu Pendengaran Bagi Tuna Rungu Oleh Dinas Sosial Wonosobo**

Aksi sosial merujuk pada tindakan sukarela atau inisiatif yang diambil oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengatasi masalah sosial tertentu. Aksi sosial dapat mencakup berbagai kegiatan, mulai dari kampanye penyuluhan, penggalangan dana untuk amal, partisipasi dalam proyek-proyek kemanusiaan, hingga advokasi terhadap perubahan

sosial dan kebijakan (Supardan, 2008). Dalam konteks analisis dampak program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo, aksi sosial terwujud melalui upaya pemberian alat bantu pendengaran kepada penyandang disabilitas auditif. Program ini dapat dianggap sebagai bentuk aksi sosial karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial kelompok yang rentan, yaitu penyandang disabilitas (Yin, 2004).

Dalam definisi aksi sosial, terdapat elemen sukarela dan niat positif untuk menciptakan perubahan yang menguntungkan bagi masyarakat. Dinas Sosial Wonosobo sebagai pelaksana program ini secara sukarela terlibat dalam memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas, bukan hanya dalam hal teknis alat bantu pendengaran tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Dukungan ini mencakup edukasi masyarakat sekitar dan menciptakan kesadaran akan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas auditif di wilayah tersebut. Fokus program ini tidak hanya pada pemberian alat bantu pendengaran semata, tetapi juga pada dampak jangka panjang yang dihasilkan, termasuk perubahan dalam aksesibilitas fisik dan komunikasi, pemberdayaan individu, serta peran aktif Dinas Sosial Wonosobo sebagai pengelola dan fasilitator.

- 1) Peningkatan Aksesibilitas: Program ini telah membawa perubahan positif dalam aksesibilitas fisik dan komunikasi bagi penyandang disabilitas auditif di Wonosobo. Alat bantu pendengaran memberikan kebebasan baru bagi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Observasi partisipan secara konsisten mencatat kemudahan akses ke fasilitas publik, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Sebagai contoh, aksesibilitas terhadap

transportasi dan fasilitas umum menjadi lebih efektif, memperbaiki mobilitas penyandang disabilitas secara signifikan.

- 2) Pemberdayaan Individu: Dampak pemberdayaan individu setelah partisipasi dalam program ini sangat mencolok. Wawancara mendalam mengungkapkan peningkatan tingkat kepercayaan diri dan kemandirian mereka. Alat bantu pendengaran tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga alat psikologis yang memberikan dukungan emosional. Penerima manfaat program melaporkan perasaan lebih percaya diri dalam berkomunikasi, terlibat dalam kegiatan sosial, dan bahkan mengakses peluang pekerjaan yang sebelumnya sulit dicapai.
- 3) Peran Aktif Dinas Sosial Wonosobo: Peran Dinas Sosial Wonosobo dalam merancang, mengimplementasikan, dan mendukung program ini merupakan faktor kunci dalam kesuksesannya. Dinas Sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyedia alat bantu pendengaran, tetapi juga sebagai pihak yang memfasilitasi inklusi sosial. Mereka terlibat aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Dukungan pascapenyerahan alat bantu juga diberikan untuk memastikan penerima manfaat dapat memaksimalkan manfaat dari alat bantu pendengaran mereka.

Rekomendasi lainnya termasuk perluasan cakupan program untuk mencakup lebih banyak penerima manfaat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintah setempat untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu pendengaran (Ridlwan, 2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Ridlwan, 2013) menyebutkan bahwa, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Indonesia mengirim delegasi untuk penandatanganan yang

dipimpin oleh departemen teknis yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia. Empat tahun kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011. Penandatanganan tersebut menunjukkan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dari pembahasan tersebut, Evaluasi program secara berkala juga diperlukan untuk mengukur keberlanjutan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo membuktikan dirinya sebagai langkah konkret dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Dampak positifnya yang signifikan mencakup peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan individu, dan peran proaktif Dinas Sosial sebagai pemimpin dalam membentuk perubahan positif. Meskipun tantangan masih ada, rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan program memberikan arah bagi keberlanjutan inisiatif ini dalam mendukung penyandang disabilitas auditif menuju kehidupan yang lebih baik.

### **Analisa Dampak Penyerahan Alat Bantu Pendengaran Bagi Tuna Rungu Oleh Dinas Sosial Wonosobo**

Program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo memiliki dampak besar terhadap penyandang disabilitas auditif di wilayah tersebut. Analisis dampak ini mencakup perubahan positif dalam aksesibilitas, pemberdayaan individu, dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Sosial (Rofa'ah, 2005).

- 1) Peningkatan Aksesibilitas: Dampak pertama yang dapat diidentifikasi adalah perubahan signifikan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas auditif.

Sebelum program ini, banyak dari mereka menghadapi kendala dalam berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Namun, setelah menerima alat bantu pendengaran, mereka melaporkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Aksesibilitas fisik, terutama terhadap fasilitas umum dan transportasi, menjadi lebih mudah dan efisien. Observasi partisipan menunjukkan kebebasan baru yang mereka rasakan dalam mengakses tempat-tempat umum, menciptakan perubahan yang nyata dalam mobilitas mereka.

- 2) **Pemberdayaan Individu:** Dampak pemberdayaan individu sangat mencolok. Para penerima manfaat program melaporkan peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian setelah menggunakan alat bantu pendengaran. Alat ini bukan hanya menjadi sarana teknis, tetapi juga simbol kebebasan dan kemandirian. Kemampuan untuk berkomunikasi secara lebih efektif membuka pintu untuk mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Peningkatan partisipasi ini juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan psikologis mereka, menciptakan perasaan inklusi dalam masyarakat.
- 3) **Dukungan Aktif Dari Dinas Sosial:** Peran Dinas Sosial Wonosobo dalam program ini tidak hanya terbatas pada penyediaan alat bantu pendengaran. Mereka aktif terlibat dalam memberikan dukungan dan fasilitasi selama seluruh proses, dari seleksi penerima manfaat hingga pemeliharaan alat setelahnya. Dukungan ini mencakup edukasi masyarakat sekitar tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas, menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Peran proaktif Dinas Sosial menjadi faktor kunci dalam mencapai dampak positif ini.
- 4) **Tantangan dan Peluang Kedepan:** Meskipun dampaknya positif, program ini tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi sebelum program diluncurkan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk

meningkatkan upaya sosialisasi termasuk kampanye publik yang lebih luas dan kerjasama dengan media lokal. Selain itu, perluasan cakupan program untuk mencakup lebih banyak penerima manfaat dan evaluasi rutin dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan dampak positif dan memastikan keberlanjutan program ini.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ketika Tuli berinteraksi dengan orang dengar, orang dengar membutuhkan interpreter untuk mengetahui maksud dari pesan yang disampaikan oleh Tuli. Selain itu juga ketika Tuli sulit memahami pesan yang disampaikan orang dengar maka orang yang memiliki panca indera sempurna seringkali menggunakan alat tulis sebagai media komunikasi. Hal yang sering kali terjadi ialah adanya diskriminasi oleh orang dengar terhadap Tuli. Tuli cenderung memiliki sensitifitas atau perasaan mudah tersinggung dibanding dengan orang dengar. Jadi, untuk terjalannya komunikasi yang lebih efektif maka harus ada sikap saling menghargai satu sama lain.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pawestri, 2017) yang menyatakan bahwa, Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, kebijakan-kebijakan terhadap aksesibilitas harus diterapkan pada, antara lain:

- 1) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca dan penerjema bahasa isyarat profesional, untuk

memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik.

- 2) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi.

Berdasarkan Analisis dampak program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo menyoroiti kontribusi positifnya terhadap kualitas hidup penyandang disabilitas auditif di wilayah tersebut. Peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan individu, dan dukungan aktif dari Dinas Sosial merupakan bukti bahwa program ini bukan hanya menyediakan solusi teknis, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pengembangan, program ini memiliki potensi untuk terus memberikan dampak positif dalam mendukung inklusi sosial dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari analisis dampak program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo adalah bahwa program ini memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap kualitas hidup penyandang disabilitas auditif di wilayah tersebut. Peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan individu, dan dukungan aktif dari Dinas Sosial Wonosobo merupakan hasil yang mencerminkan keberhasilan program ini. Program tersebut tidak hanya memberikan solusi teknis berupa alat bantu pendengaran, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, termasuk perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Dengan adanya peningkatan aksesibilitas, terutama dalam lingkungan fisik dan komunikasi, penyandang disabilitas auditif dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan individu menjadi dampak positif lainnya, di mana para penerima

manfaat melaporkan peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian setelah menggunakan alat bantu pendengaran.

Program ini tidak hanya menciptakan perubahan teknis, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang penting bagi penyandang disabilitas. Peran aktif Dinas Sosial Wonosobo sebagai fasilitator program dan agen perubahan sosial turut berkontribusi pada kesuksesan program ini. Dukungan mereka tidak hanya terbatas pada pemberian alat bantu pendengaran, tetapi juga melibatkan edukasi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Meskipun program ini memiliki dampak positif, tantangan seperti kurangnya sosialisasi sebelum program diluncurkan masih perlu diatasi. Rekomendasi untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan memperluas cakupan program dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dampak positif ini. Secara keseluruhan, program penyerahan alat bantu pendengaran oleh Dinas Sosial Wonosobo membuktikan diri sebagai inisiatif yang berhasil dalam mendukung inklusi sosial dan kesejahteraan penyandang disabilitas auditif. Dengan terus mengatasi tantangan dan memperbaiki program berdasarkan evaluasi berkala, program ini memiliki potensi untuk terus memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas.

### **Daftar Pustaka**

- Sastrawinata. 1977. Pendidikan Anak Tunarungu. Jakarta: Depdikbud.
- Siddiqui, H.Y. 1984. Social Work and Social Action (ed). Hanam Publications.
- Suaja, I Ketut. 2013. Memahami Kaum Tunarungu Wicara. Denpasar: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali.

- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supardan, Dadang. 2008. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yin, Robert K. 2004. STUDI KASUS: Desain dan Metode, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2013. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilites). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung. Volume 7, no. 2: 31-38.
- Ro'fah. 2015. Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur dalam Kamil Alfi Arifin (ed.) Analekta Disabilitas: Sumbangsih untuk Pengayaan Rancangan Undang-Undang Disabilitas. Jurnal DIFABEL. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Vol. 2, no. 2: 25-40.
- Pawestri, Aprilina. 2017. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Era Hukum Universitas Sebelas Maret. Volume 2, no. 1: 4-10.